

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sastra merupakan suatu media penyampaian gagasan, ide dan pemikiran seseorang pengarang dengan pengalaman sebagai hasil kegiatan yang imajinatif kepada masyarakat pembacanya. Sastra menyuguhkan pengalaman batin yang pernah dialami pengarang kepada penikmat karyanya dengan menggunakan media bahasa. Karya sastra menyajikan permasalahan sosial yang sebagian besar merupakan representasi dari kenyataan sosial. Karya sastra merupakan karya seni yang mediumnya bahasa, dan isinya tentang manusia dan kemanusiaan.

Pada dasarnya, karya sastra cenderung melihat fenomena yang ada di sekitarnya dalam mengungkapkan sesuatu masalah yang dihadapi. Karya sastra akan bisa bertahan dan akan selalu hidup jika mampu menyuarakan masalah yang dihadapi masyarakat pada zamannya. Nilai-nilai inilah yang perlu direnungi dan dihayati, sehingga karya sastra dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakatnya.

Berdasarkan asumsi di atas, maka dapat dipahami bahwa karya sastra tidak dapat dibangun tanpa dukungan dari masyarakat dan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Dan karya sastra tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial tempat terciptanya karya sastra tersebut. Maka dari itu, karya sastra memiliki hubungan timbal-balik dengan masyarakatnya.

Sebagai generasi yang tidak pernah merasakan secara langsung penjajahan belanda, waktu membaca novel *TAN* karya Hendri Teja penulis seakan melihat dan merasakan bagaimana situasi dan keadaan zaman dimana kekuasaan penjajah begitu jelas terungkap. Karya sastra terbentuk atas dasar gambaran kehidupan yang dialami oleh Manusia.

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dapat menjadi acuan imajinasi untuk menciptakan karya sastra. Hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa, hubungan, maupun hal-hal lain yang erat kaitanya dengan sesuatu yang biasa dilakukan, dilihat, dan diketahui oleh masyarakat dalam kehidupan nyata. Pengarang dalam menciptakan sebuah karya tentu memperhatikan unsur-unsur pembangun karya sastra itu sendiri, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik.

Lomme dalam Pradotokusumo (2005: 116) menjelaskan bahwa karya sastra itu bersifat mimetik yang berarti tiruan kehidupan Manusia. Wellek (1990: 110) menjelaskan bahwa sastra merupakan ungkapan perasaan masyarakat, yaitu cerminan dan ekspresi hidup suatu kelompok sosial yang terjadi di sekitar kehidupan pengarang. Pengarang tidak harus mengekspresikan kehidupannya secara keseluruhan, tetapi harus dapat memadukan antara apa yang dialami, apa yang diketahui, dan imajinasi yang dimiliki.

Sastra dan masyarakat memiliki hubungan karena sastra tidak dapat terlepas dari sistem politik, ekonomi, dan sosial tertentu. Masyarakat memiliki pengaruh atas terciptanya sebuah karya sastra, karena selain pengarang merupakan bagian dari

masyarakat, sastra juga menyajikan sebagian besar kehidupan yang terjadi pada kenyataan sosial. Sastra selalu memandang alam dan manusia sebagai objek. Sastra dalam kehidupan masyarakat juga memiliki kedudukan berarti, apa yang dituliskan saat ini tidak hanya bernilai saat ini saja, akan tetapi juga memiliki nilai di kehidupan akan datang.

Perihal tersebut menunjukkan bahwa di dalam karya sastra terdapat nilai sejarah. Sejarah merupakan salah satu objek yang dapat mempengaruhi unsur pembentuk karya sastra. Fakta sosial masyarakat sastra dapat menggambarkan atau menceritakan sejarah yang dialami oleh seseorang di eranya.

Sejarah jika dituliskan dalam sebuah karya sastra, maka akan menjadikan karya sastra tersebut lebih hidup dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan di masa akan datang. Sejarah atau segala sesuatu yang sudah terjadi tidak akan dapat diulang kembali akan tetapi dapat dijadikan pengetahuan dan pembelajaran agar kedepannya menjadi lebih baik sebagaimana ungkapan yang berbunyi “masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah kenyataan, dan hari esok adalah masa depan”.

Kurniawan (2002: 105) memaparkan bahwa karya sastra tidak dapat lepas dari masyarakat dan sejarah karena sastra merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai kekuasaan dan politik yang terdapat dalam masyarakat. Hubungan timbal balik mengenai keterkaitan sastra dengan masyarakat maupun masyarakat dengan sastra sangat erat. Masyarakat sebagai objek yang dijadikan cerminan imajinasi hingga terbentuk sebuah karya sastra. Studi mengenai sastra dan

hegemoni dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan sastra dengan kejadian sosial yang terjadi di masanya.

Melalui Hegemoni kita dapat mengetahui berbagai masalah yang terangkum dalam karya sastra. Sebagaimana wujud kekuasaan dalam Hegemoni yang dapat dilihat dari dua golongan, yaitu golongan penguasa dan yang dikuasai. Melalui nilai-nilai kekuasaan inilah, nilai sejarah yang terkandung dalam sebuah karya sastra dapat diketahui.

Faruk (1999: 62) menjelaskan bahwa karya sastra yang bersifat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keberlangsungan hidup masyarakat, memiliki kekuatan yang dapat membentuk gagasan atau ideologi. Sebuah wacana yang menyangkut kekuasaan biasanya, di dalamnya terdapat penolakan dan perlawanan. Indonesia sebagai negara yang telah berabad-abad dalam kekuasaan penjajah, tentu meninggalkan banyak nilai sejarah semasa penjajahan. Salah satunya adalah penjajahan yang dilakukan oleh golongan kolonial, tepatnya dari era kolonial hingga setelahnya (postkolonial). Pertengahan abad ke-20 setelah merdeka, Indonesia masih belum dapat dikatakan bebas. Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, maupun psikologi yang perlu diselesaikan (Ratna, 2008: 80).

Novel *TAN* bercerita tentang masa kolonial Netherland yang pada saat itu menjajah indonesia, Novel *TAN* membahas mengenai jati diri tokoh Tan lebih sempurna. Dalam novel ini, karakter penokohan Tan yang lebih menonjol. Karakter pekerja keras dengan Tekad yang kuat diurai dengan bahasa yang mudah dipahami.

Sosok Tan Malaka pejuang kemerdekaan Indonesia yang misterius terpotret jelas pada lensa Novel *TAN*. Hendri Teja secara Gamlang menggambarkan Tan Malaka, adalah sosok pejuang yang sangat menentukan arah dan revolusi di Indonesia hingga Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.

Berdasarkan fenomena yang ada dalam Novel *TAN* karya Hendri Teja, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Hegemoni Gramsci dalam pendekatan sosiologi sastra.

### **B. Batasan Masalah**

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan bentuk Hegemoni kelas berkuasa, Peran kaum intelektual dan ideologi tokoh dalam novel *TAN* karya Hendri Teja.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Batasan masalah Peneliti membuat suatu rumusan masalah yang lebih spesifikasi terhadap masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Cara Hegemoni kelas berkuasa yang terjadi dalam novel *TAN* karya Hendri Teja?
2. Bagaimana ideologi tokoh dalam novel *TAN* karya Hendri Teja?
3. Bagaimana peran kaum intelektual dalam novel *TAN* Karya Hendri Teja?

### **D. Tujuan dan Manfaat penelitian**

Sesuai rumusan Masalah di atas, penelitian memiliki dua tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan cara Hegemoni kelas berkuasa yang terjadi dalam novel *TAN* karya Hendri Teja.
2. Untuk mendeskripsikan ideologi tokoh dalam novel *TAN* karya Hendri Teja.
3. Untuk mendeskripsikan peran kaum intelektual dalam *TAN* karya Hendri Teja.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam dunia sastra Indonesia baik manfaat teoritis maupun praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan teori sastra, khususnya mengenai teori hegemoni Antonio Gramsci dalam melakukan analisis sebuah karya sastra.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Bagi pembaca, diharapkan dapat lebih memahami isi cerita novel *TAN* terutama bentuk hegemoni dan cara mengaplikasikan teori hegemoni Antonio Gramsci dalam mengkaji karya sastra.
- b. Bagi pecinta sastra, penelitian ini dapat menambah wawasan dan minat pembaca dalam memahami dan mengapresiasi karya sastra.
- c. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi dan kontribusi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Mansyur Yusuf 2017. Hegemoni dalam Novel Bekisar Merah Karya Ahmad Tohari. Permasalahan yang terdapat di dalamnya yaitu, bagaimana hegemoni kelas berkuasa. bagaimana hegemoni budaya, ideologi tokoh, peran kaum intelektual serta peran Negara. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif.

Falah, 2018. Hegemoni Ideologi dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman el Shirazy (Kajian Hegemoni Gramsci) dengan tujuan mengungkap bentuk hegemoni ideologi, yang menunjukkan Khairul Azzam dan Anna Althafunnisia yang mampu menjalani hidupnya dengan adanya persoalan pendidikan, percintaan, dan pernikahan. Relevansinya terhadap penelitian ini yaitu terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu sosiologi sastra Gramsci.

Putra, 2018. Cerminan Zaman dalam Puisi (Tanpa Judul) Karya Wiji Thukul: Kajian Sosiologi Sastra. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa puisi ciptaan Wiji Thukul adalah cerminan pada masa Orde Baru. Puisi Wiji Thukul dengan judul (*Tanpa Judul*), menggambarkan adanya tekanan yang dialami pengarang dan masyarakat pada era Orde Baru.

Dwi Ihsanu Nurhidayah, 2019. Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel Orang-orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Sosiologi sastra. Hasil Penelitian ini menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kelas sosial atas dan kelas sosial bawah dan bentuk hegemoni yaitu dominasi dengan cara kekerasan serta hegemoni ideologi

dengan cara halus melalui berbagai pemikiran-pemikiran untuk mengasut orang lain melalui kata-kata yang bisa meneghemoni orang lain hingga orang lain tidak akan sadar bahwa dirinya sedang dihegemoni.

Irwan, H. (2018). Hegemoni Kelas Berkuasa Terhadap Kelas Subordinat dalam Novel Kubah Karya Ahmad Tohari (Tinjauan Hegemoni Antonio Gramsci). Temuan dalam penelitian ini, yaitu; 1) Hegemoni kelas berkuasa terhadap kelas subordinat yaitu tergambaran Posisi tokoh Margo dan Triman sebagai kelas berkuasa dengan cara menanamkan ideologi kepada tokoh Karman sebagai pemikir awam atau kelas subordinat. Tokoh Karman telah terhegemoni ideologi komunisme dengan menyakini komunisme di gerak alam bawah sadarnya yang ditanamkan secara sabar dan teratur oleh kelompok Margo dan Triman sebagai kelas berkuasa yang berperan sebagai kaum intelektual organik. Untuk mendapatkan persetujuan kelas subordinat maka kelas berkuasa menciptakan dan mempertahankan aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis. 2) Dampak hegemoni kelas berkuasa terhadap kelas subordinat berdampak negatif. Beberapa peristiwa cerita yang mempunyai peran hegemonik dalam novel memberi dampak negatif bagi tokoh-tokoh cerita. Dampak negatif terlihat ketika perubahan karakter yang dialami tokoh Karman. Tokoh Karman mulai meninggalkan peribadatan atau ibadah dan dampak negatif lainnya yang didapatkan tokoh Karman membuatnya dipenjara dan dibuang ke Pulau Buru.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Sastra**

Sastra lahir dan berkembang dalam lingkungan Masyarakat. Maka dari itu, karya sastra tercipta untuk dapat dinikmati dan dipahami bagi Masyarakat pembacanya. Sastra menyuguhkan gambaran kehidupan yang merupakan kenyataan sosial. Sastra lahir disebabkan dorongan dasar manusia untuk menaruh perhatian terhadap permasalahan realitas sosial yang berlangsung sepanjang zaman.

Teeuw (1984:23) mengatakan bahwa kata sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa sangsekerta, akar kata “sas” dalam kata kerja turunan berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau intruksi. Akhiran “tra” dapat berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku intruksi atau pengajaran: misalnya silap sastra, buku arsitektur, kamasastra, buku perunjuk, mengenai seni cinta.

Wellek dan Warren (1995:3) mengatakan sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Menurut wellek dan warren (1995:14) istilah sastra paling tepat diterapkan pada seni sastra, yaitu sebagai karya imajinatif. Memang ada sedikit kesulitan dalam menggunakan istilah ini. Tapi istilah lain yaitu “fiksi” dan “puisi” terlalu sempit pengertiannya. Sedangkan istilah *sastra imajinatif* dan *belles-letter* agak kurang cocok dan bisa memberi pengertian keliru. Istilah inggris *literature* mengacu pada karya tulis atau cetak. Padahal seharusnya kesusastraan juga meliputi sastra lisan.

Menurut Plato, sastra merupakan cermin atau gambar mengenai kenyataan (*mimesis*), kemudian Aristoteles menambahkan bahwa dalam *mimesis* tidak semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan merupakan sebuah proses kreatif penyair, sambil

bertitik pangkal pada kenyataan, menciptakan sesuatu yang baru (Lexemburg, dkk, 1984;17).

Sastra bagi Gramsci, lebih bersifat sosio-historis, terutama terkait persoalan dengan hegemoni dan penciptaan sebuah kebudayaan baru. Bagi Gramsci, sastra dan seni adalah sebuah aspek dari kebudayaan, dan tidak akan ada gerakan memperjuangkan “sastra baru” yang dapat dipisahkan dari perjuangan membangun atau bergerak kearah “kebudayaan baru”, (Anwar, 2010: 69-70).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami, sastra merupakan hasil imajinasi dari pengarang yang tidak terlepas dari situasi dan kondisi dari lingkungan Masyarakat tempat terciptanya karya sastra tersebut.

## **2. Sosiologi Sastra**

Sosiologi sastra merupakan suatu kajian ilmu interdisiplin (lintas disiplin), antara sosiologi dan ilmu sastra. Sosiologi sastra dapat dipahami seiring perubahan zaman yang semakin menglobal yang memungkinkan sering terjadinya interaksi antarindividu. Komunikasi antar individu merupakan aktivitas yang unik yang membutuhkan saling keterpahaman. Untuk itu masalah kebudayaan (termasuk di dalamnya sosiologi sastra) menjadi suatu pengetahuan yang esensial. Hal ini karena sosiologi sastra dianggap dapat membantu memahami kehidupan manusia. Makin disadari bahwa kehidupan sosial manusia tidak hanya dibangun oleh serangkaian aksi

dan interaksi yang bersifat fiksi dan behavioristik, tapi dibangun oleh sistem dan praktek-praktek penandaan atau simbolik, (Saraswati,2003 1).

Menurut Damono secara singkat dapat dijelaskan bahwa sosiologi adalah telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat; telaah tentang Lembaga dan proses sosial. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat dapat dimungkinkan, bagaimana berlangsung dan bagaimana ia tetap ada. Dengan mempelajari Lembaga-lembaga sosial dan segala masalah perekonomian, keagamaan, politik, dan lain-lain yang kesemuanya itu merupakan struktur sosial. Kita mendapatkan gambaran tentang cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya tentang mekanisme sosialisasi, proses pembudayaan yang menempatkan anggota masyarakat di tempatnya masing-masing, (Saraswati, 2003: 3).

Menurut Wolff mengatakan bahwa sosiologi kesenian dan kesusastaan merupakan suatu disiplin yang tanpa bentuk, tidak terdefenisikan dengan baik, terdiri dari sejumlah studi empiris dan berbagai percobaan pada teori yang agak lebih general, yang masing-masing hanya mempunyai kesamaan dal hal ini bahwa semuanya berurusan antara seni/kesusastraan dan masyarakat, (Faruk, 2015:4). Ritzer menganggap sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang multiparadikma. Maksudnya didalam di dalam ilmu tersebut dijumpai beberapa paradigma yang saling bersaing satu sama lain dalam usaha merebut hegemoni dalam lapangan sosiologi secara kesleuruhan, (Saraswati, 2003: 2).

Wellek dan Austin Warren (1995: 111-112), mengklasifikasikan hubungan yang nyata antara sastra dan masyarakat yang bersifat deskriptif. *Pertama* adalah sosiologi pengarang, profesi pengarang dengan intuisi sastra. Masalah yang berkaitan di sini adalah ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang dan ideologi pengarang yang terlahir dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. *Kedua* adalah isi karya sastra, tujuan serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang *Ketiga* adalah permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Sejauh mana sastra ditentukan atau tergantung pada latar sosial, perubahan dan perkembangan sosial, adalah pertanyaan yang termasuk kedalam ketiga jenis permasalahan di atas, sosiologi pengarang, isi karya sastra yang bersifat sosial, dan dampak sastra terhadap masyarakat.

### **3. Hegemoni**

Menurut Hendarto Mengenai hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut "*eugemonia*", sebagaimana yang dikemukakan *Encyclopedia Britannica* dalam prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara/kota (*Polis atau citystates*) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara/kota Athena dan spartan, terhadap negara-negara lain yang sejajar (Patria & Andi Arief, 2003: 115).

Gagasan tentang hegemoni pertama kali diperkenalkan pada 1885 oleh para marxis Rusia, terutama oleh Plekhanov pada 1883-1984. Gagasan tersebut telah

dikembangkan sebagai bagian dari strategi untuk menggulingkan Tsarisme. Istilah tersebut menunjukkan kepemimpinan hegemonik yang harus dibentuk oleh kaum proletar, dan wakil-wakil politiknya, dalam suatu aliansi dengan kelompok-kelompok lain, termasuk beberapa kritikus borjuis, petani, dan intelektual yang berusaha mengakhiri negara polisi Tsaris (Bacock, 2007: 22).

Konsepsi Lenin bahwa hegemoni adalah strategi yang dilakukan oleh para pekerja untuk memperoleh dukungan mayoritas. Sebagai landasan teori yang dibangun Gramsci secara sistematis, hegemoni oleh Gramsci ditempatkan dalam relevansinya yang sangat kuat dengan aspek superstruktur maupun ideologi (Anwar, 2010: 80).

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melakukan penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Ada beberapa cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di Masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari Masyarakat. Karena itu hegemoni pada hakekatnya adalah Upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan, (Patria & Andi Arief, 2003:120-121).

Kepemimpinan hegemonik mencakup tindakan mengembangkan persetujuan intelektual, moral, dan filosofis dari semua kelompok utama dalam suatu bangsa. Hal itu pun mencakup suatu dimensi emosional, karena para pemimpin politik yang berusaha mencapai kepemimpinan hegemoni harus memperhatikan sentimen-sentimen

dari masyarakat-bangsa dan tidak boleh tampak sebagai makhluk aneh atau asing yang terpisah dari massa. Implikasi dari jenis konsepsi hegemoni ini bagi persoalan-persoalan yang teoretis, terutama hubungan antara filsafat dan teori sosial, (Bocock, 2007: 40-41).

#### **4. Teori Hegemoni Antonio Gramsci**

Teori hegemoni Antonio Gramsci adalah salah satu teori politik penting abad XX teori ini dibangun di atas premis pentingnya ide dan tidak mencakupi kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Gramsci, agar yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual (Sugiono, 2003:31).

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukanlah dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus, (Simon, 2004:19-20).

Gramsci memulai analisisnya dengan sebuah pernyataan kriteria metodologi yang harus digunakan oleh studi kita sendiri. Bahwa supremasi sebuah kelompok sosial

memanifestasikan dirinya dengan dua cara, sebagai dominasi dan sebagai kepemimpinan intelektual dan moral, (Gramsci, 2013:63.)

Gramsci mengkontraskan aturan (*rute*), yang merupakan kontrak politik langsung yang menggunakan kekerasan jika perlu, dengan hegemoni, yaitu (seperti yang didefinisikan oleh Raymond William) “proses yang dijalankan secara menyeluruh, yang terorganisir secara praktis oleh makna-makna khusus dan dominan, nilai dan paham semacam yang dapat diabstraksikan sebagai ‘pandangan-dunia’ atau “tampilan kelas”. Williams menghubungkan hegemoni dan budaya secara umum dengan ideologi secara khusus. Hegemoni sebagai bentuk kontrol sosial yang terinternalisasi yang membuat pandangan tertentu tampak “alami” atau tak nampak sehingga hampir tidak seperti pandangan sama sekali, “hanyalah perihal apa adanya”, (Barry, 2010: 192-193).

Gramsci mengembangkan konsep hegemoni dengan berpijak pada kepemimpinan yang sifatnya ‘intelektual dan moral’. Kepemimpinan ini terjadi karena adanya persetujuan yang bersifat sukarela dari kelas bawah atau masyarakat terhadap kelas atas yang memimpin, terutama persetujuan dari kelompok-kelompok utama dalam suatu masyarakat, (Hefni, 2011: 64).

Secara umum hegemoni mengoreksi pandangan marxis kuno. *Pertama*, hegemoni tidak memutarbalikan model basis-superstruktur tradisional marxis, melainkan menafsirkan Kembali berdasarkan paham Crocean. Penggagas konsep ini menolak interpretasi “Materealisme vulgar” dan kecenderungan sosiologi positivis

evolusioner. *Kedua*, hegemoni melihat negara sebagai sesuatu yang abadi tak punya konteks historis, mentransendenkan Masyarakat sebagai kolektivitas yang ideal. *Ketiga*, dalam konsep hegemoni dikenal adanya skematisasi pemilihan intelektual ke dalam intelektual organik dan intelektual tradisional. *Keempat*, hegemoni memiliki makna ideologi dominan.

Pada rezim orde baru, ideologi dominan dijadikan pembenaran kebijakan bagi aparatur yaitu “Pembangunan”. Hal itu menunjukkan bahwa istilah demi kepentingan umum atau Pembangunan nasional untuk segala lapisan Masyarakat biasanya dipakai sebagai pembenaran terhadap penggunaan kekuasaan negara untuk memaksa seorang atau kelompok warga agar bersedia mematuhi keinginan negara, (Saraswati, 2003: 141-143).

Suatu konsep sentral dalam hal perjuangan untuk mendapatkan hegemoni adalah konsep bangsa. Hegemoni berarti kepemimpinan orang-orang dari semua kelas dalam negara-negara tertentu. Menurut Gramsci, hal ini tidak akan pernah dapat dicapai oleh tindakan-tindakan korporasi-ekonomi yang sempit dari orang-orang berkuasa dalam sistem negara tersebut. Orang-orang tersebut harus di arahkan untuk menekankan aspek kreatif dan konsumtif dalam mengarahkan orang-orang tersebut. Penekanan tersebut tidak diizinkan untuk mengaburkan proses-proses yang dapat ditempuh oleh suatu Kumpulan orang untuk membentuk diri mereka masing-masing, terlepas dari usaha pengarahan orang-orang dari luar sebagai anggota dari Masyarakat (*people*) yang sama, (Bacock, 2007:38).

Gramsci memakai konsep hegemoni untuk menjabarkan dan menganalisa bagaimana masyarakat kapitalis modern diorganisasi, atau diorganisasikan pada masa dulu dan nanti, (Patria & Andi Arief, 2003: 31). Menurut Gramsci, (supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai “dominasi” dan sebagai, kepemimpinan intelektual dan moral. Dan di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk “menghancurkan” atau menundukkan mereka, bahkan mungkin dengan menggunakan kekuatan bersenjata; di lain pihak, kelompok sosial memimpin kelompok-kelompok kerabat dan sekutu mereka.

Sebuah kelompok sosial dapat dan bahkan harus sudah menerapkan “kepemimpinan” sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan (kepemimpinan tersebut merupakan salah satu dari syarat-syarat utama untuk memenangkan kekuasaan semacam itu). Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktikkan kekuasaan, tapi bahkan bila dia telah memegang kekuasaan penuh di tangannya, Kepemimpinan yang dia masih harus terus “memimpin” juga, (Patria & Andi Arief, 2003: 117-118).

Adapun hubungan dua jenis kepemimpinan menurut Gramsci, kepemimpinan (direction) dan dominasi (dominance) itu menyiratkan tiga hal pertama, dominasi dijadikan atas keseluruhan musuh, dan hegemoni dilakukan kepada segenap sekutu-sekutunya, kedua, hegemoni adalah suatu prakondisi untuk menaklukkan apparatus negara atau dalam pengertian sempit kekuasaan pemerintahan. Ketiga, sekali

kekuasaan negara dapat dicapai, dua aspek supremasi kelas ini baik pengarahannya maupun dominasi, terus berlanjut.

Dengan demikian, konsep hegemoni yang dikembangkan Gramsci berpijak mengenai kepemimpinan yang sifatnya 'intelektual dan moral'. Kepemimpinan ini terjadi karena adanya kesetujuan yang bersifat sukarela dari kelas bawah atau Masyarakat terhadap kelas atas yang memimpin. Kesetujuan kelas bawah ini terjadi karena berhasilnya kelas atas dalam menanamkan ideologi kelompoknya. Internalisasi ideologis ini dilakukan dengan membangun sistem dan Lembaga-lembaga, seperti negara, *Common sense*, kebudayaan, organisasi, Pendidikan dan seterusnya, yang dapat memperkokoh hegemoni tersebut.

Di sisi lain, hegemoni terhadap kelas bawah tidak selamanya berjalan mulus, hambatan dan rintangan bisa saja datang terutama dari kelas-kelas yang tidak menerima hegemoni tersebut. Yang dilakukan untuk menangani ketidaksetujuan itu dilakukan dengan tindakan dominasi yang represif melalui aparatus negara, misalnya polisi. Dua kepemimpinan, dominasi dan hegemoni menjadi hal penting dalam teori hegemoni Gramsci, (Kurniawan, 2007:3-4)

Hegemoni kelas berkuasa terhadap kelas yang dikuasai, sesungguhnya dibangun oleh mekanisme konsensus, (Patria & Andi Arief, 2003: 123). Ketika Gramsci berbicara tentang konsensus, ia selalu mengkaitkannya dengan spontanitas bersifat psikologis yang mencakup beberapa penerimaan aturan sosiopolitik ataupun aspek-aspek aturan yang lain. Tatanan hegemoni menurut Gramsci, tidak perlu masuk ke

dalam institusi ataupun praktik liberal sebab hegemoni pada dasarnya merupakan suatu totalitarisme dalam arti ketat (Patria & Andi Arief, 2003: 125).

Femia menangkap tiga kategori penyesuaian yang berbeda yang dikemukakan Gramsci, yaitu karena rasa takut kerana terbiasa dan karena kesadaran dan persetujuan tipe yang terakhir inilah yang kemudian disebut Gramsci sebagai hegemoni (Patria & Andi Arief, 2003: 125). Ketiga kategori ini meliputi:

1. Orang menyesuaikan diri mungkin karena takut akan konsekuensi-konsekuensi bila ia tidak menyesuaikan. Disini konformitas ditempuh melalui penekanan dan sanksi-sanksi yang menakutkan.
2. Orang menyesuaikan diri mungkin karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu. Konformitas dalam hal ini merupakan soal partisipasi yang tetap, sebab orang menganut pola-pola tingkah laku tertentu dan jarang dimungkinkan untuk menolak.
3. Konformitas yang muncul dari tingkah laku mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentu dalam Masyarakat, (Patria & Andi Arief, 2003: 125-126).

Persoalannya kemudian Gramsci tidak secara spesifik melihat tipe dan macam konsensus apa yang secara determinan menentukan situasi hegemoni. Konsensus menurut Gramsci, lebih mewujudkan suatu hipotesis bahwa terciptanya karena ada dasar persetujuan, (Patria & Andi Arief, 2003: 126).

Bagi Gramsci, hegemoni melalui konsensus muncul melalui komitmen aktif atas kelas secara historis lahir dalam hubungan produksi. Untuk itu, Gramsci mengatakan secara tak langsung konsensus sebagai “komitmen aktif” yang didasarkan pada adanya pandangan bahwa posisi tinggi yang ada sah (legitimate). Konsensus ini secara historis “lahir” (disebabkan oleh) karena prestasi yang berkembang dalam dunia produksi, (Patria & Andi Arief, 2003: 126).

Gramsci mengidentifikasi mekanisme-mekanisme yang memungkinkan sebuah sistem ide dalam mempertahankan kekuasaannya bahkan kekuasaan tersebut secara terang-terangan didasarkan pada penguasa suatu kelas terhadap kelas-kelas lain. Hegemoni jawaban yang diberikan oleh Gramsci. Bentuk kekuasaan ini tidak benar-benar ditopang oleh dominasi politik dan ekonomi.

Pada kenyataannya, kelompok-kelompok sosial yang subordinat agar menerima sistem kultural dan nilai-nilai etik yang di hargai oleh kelompok yang berkuasa seolah-olah sistem dan nilai tersebut benar secara universal dan melekat dalam kehidupan manusia.

Kekuasaan merupakan sesuatu yang tidak substansial jika kekuasaan tersebut disadarkan semata-mata pada koersi dan kekayaan. Pada kenyataannya, kelas-kelas dominan hanya dapat menegaskan otoritas mereka dengan cara yang menyakinkan jika kelas-kelas tersebut dapat memproyeksi pandangan hidup mereka kedalam tatanan

sosial dan membuat pandangan hidup tersebut muncul sebagai acuan Bersama (*common sense*).

Hegemoni berbeda dengan ideologi sebab hegemoni tidak semata-mata merujuk pada nilai-nilai kelas dominan melainkan mengacu pada serangkaian proses melalui mana nilai-nilai tersebut dipahami sebagai bagian dari tatanan alamia atas segala sesuatu yang dipaksakan oleh proses-proses tersebut. (Cavallaro, 2004:141).

Bagi Gramsci, hegemoni berarti situasi di mana suatu 'blok historis' faksi kelas berkuasa menjalani otoritas sosial dan kepemimpinan atas kelas-kelas subordinat melalui kombinasi antara kekuatan dengan persetujuan. Gramsci mengungkapkan norma-norma hegemoni di arena klasik rezim parlementer dicirikan dengan kombinasi kekuatan dan persetujuan, yang secara timbal-balik saling mengisi tanpa adanya kekuatan secara berlebihan memaksa persetujuan. Namun, Upaya yang sebenarnya adalah memastikan bahwa kekuatan tersebut seakan-akan hadir berdasarkan persetujuan mayoritas yang diekspresikan oleh apa yang disebut dengan organ opini publik-koran dan asosiasi, (Berker, 2009: 52-63).

Inti dari hegemoni dalam konteks teori Gramsci adalah keberhasilan kelompok para penguasa mendapatkan persetujuan dari kelompok subordinat yang dikuasai menerima dan memberi persetujuan atas ide-ide dan kepentingan-kepentingan politik dari kelompok yang menguasai mereka. Hegemoni bagi Gramsci adalah sebuah capaian penguasaan yang paling legitimate, karena kekuasaan mereka diterima dalam sistem ideologi, kebudayaan, nilai-nilai, maupun norma-norma kelompok yang

dikuasai. Penekanan Gramsci pada aspek konsensus dalam teorinya tentang hegemoni merupakan aspek lain dari perbedaannya dengan teori yang dikemukakan oleh teori marxis, (Anwar, 2010:81).

Ada tiga tingkatan hegemoni yang terdapat dalam konsep pemikiran Gramsci, yaitu hegemoni total (*integral*), hegemoni yang merosot (*decadent*) dan hegemoni yang minimum.

Pertama. Hegemoni integral. Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme baik secara sosial maupun etis, (Patria & Andi Arief, 2003:128).

Kedua, hegemoni yang merosot. Dalam Masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomi borjouis menghadapi tantangan berat. Dia menunjukkan adanya potensi disintegrasi di sana. Dengan sifat potensial ini dimaksudkan bahwa disintegarsi itu tampak dalam konflik yang tersembunyi “di bawah permukaan kenyataan sosial”. Artinya sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan atau sasaranya, namun “mentalitas” massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek hegemoni. Karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh, (Patria & Andi Arief, 2003:128).

Ketiga, hegemoni minimum. Bentuk ketiga ini merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah dibanding dua bentuk di atas. Situasi seperti inilah yang terjadi di

italia dari periode unifikasi sampai pertengahan abad. Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politik, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Dengan demikian, kelompok-kelompok hegemoni tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan negara kelas lain dalam Masyarakat, Patria & Andi Arief:128-129).

Gramsci juga membahas secara mendalam problem hegemoni. Kelas-kelas subordinat, kata Gramsci, harus memiliki kesadaran akan eksistensi mereka dan akan kekuatan mereka sendiri. hanya saja, mereka akan berhasil memiliki kesadaran tersebut sejauh mereka sanggup mengamati dan mengevaluasi eksistensi dan kekuatan kelas yang mendominasi. Kelas yang lebih rendah, yang secara historis bersifat difensi, hanya bisa menjadi sadar akan dirinya melalui negasi-negasi, melalui kesadaran akan kepribadian dan batas-batas kelas dari musuh mereka.

Namun, proses ini masih baru pada tahap awal, paling tidak pada skala nasional. Konsep kelas selalu kurang terkait dengan konsep negara, sebagaimana juga konsep perjuangan antarkelas terkait dengan konsep pengambilalihan kekuasaan. Konsep-konsep revolusi dan internasionalisme, dalam artian modern dari kata tersebut, berhubungan dengan konsepsi negara dan kelas. Pemahaman yang tidak memadai terhadap konsep negara akan berarti lahirnya kesadaran kelas yang tak memadai pula. Dan pemahaman terhadap apa itu negara harus ada bukan hanya ketika seseorang

membelanya, namun juga ketika seseorang menyerangnya dengan tujuan untuk menggulingkannya, (Pozzolini, 2006: 80-81).

Pada kenyataannya, hegemoni tersebut terdisintegrasi dibawa dampak dari penyebab-penyebab yang murni secara mekanis, dari berbagai macam jenis:

1. Karena massa yang besar, kepasifan sebelumnya, dimasukkan ke dalam pergerakan, namun pergerakan yang kacau dan tidak terorganisasi, tanpa kepemimpinan, tanpa kehendak kolektif politik yang jelas;
2. Karena kelas-kelas menengah, yang di masa perang memegang komando dan posisi-posisi vital, ketika tiba-tiba masa damai kehilangan posisi-posisinya tersebut dan menjadi pengangguran tepat setelah mereka menguasai komando, dan seterusnya;
3. Karena kekuatan-kekuatan antagonistik terbukti tidak mampu mengendalikan kekacauan situasi ini demi keuntungan mereka sendiri. Masalahnya adalah untuk merekonstruksi hegemoni aparatus terhadap elemen-elemen yang dulunya pasif dan apolitik. Tidaklah mungkin mencapainya tanpa penggunaan kekuatan yang bukan kekuatan “legal”, dan sebagainya. Semakin besar masyarakat yang apolitik, semakin besar pula kekuatan-kekuatan ilegal yang harus dimainkan. Semakin besar kekuatan-kekuatan yang secara politik terorganisasi dan terdidik, maka semakin perlu ia menutupi kekuatam legal negara dan seterusnya, (Gramsci, 2013: 317).

Gerretana, menyimpulkan, bahwa teori umum atas hegemoni adalah teori yang di mana bisa dipergunakan hegemoni proletar dan hegemoni borjuis seperti pada umumnya, berbagai relasi hegemoni. Dalam menjelaskan makna yang terkandung dalam konsep hegemoni miliknya, Gramsci mengatakan bahwa konsep atas masa depan dan kemungkinan dari hegemoni proletar menubuh dari apresiasi yang alami dari kondisi efektif dan terkini atas perlawanan kepada kaum hegemoni borjuis, di mana harus diperjuangkan, (Attamini, 2015: 1).

## **5. Konsep Pemikiran Gramsci**

Bagi Gramsci, konsep hegemoni berarti sesuatu yang lebih kompleks. Gramsci menggunakan konsep itu untuk meneliti bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologis tertentu dalam Masyarakat yang ada, sesuatu kelas yang fundamental dapat membangun kepemimpinannya sebagai sesuatu yang berbeda dari bentuk-bentuk dominasi yang bersifat memaksa. Hegemoni memperkenalkan dimensi kepemimpinan moral dan intelektual (Faruk,2015:132).

Dalam kerangka teori Gramsci setidaknya terdapat beberapa konsep kunci, yaitu kebudayaan, hegemoni, ideologi, kaum intelektual dan negara.

### **a. Kebudayaan**

Gramsci menaruh perhatian yang besar terhadap kebudayaan sebagai satu kekuatan material yang mempunyai dampak praktis dan berbahaya bagi Masyarakat. Gramsci pada saat itu menolak konsep pengetahuan ensklopedik dan melihat manusia

semata-mata wadah yang diisi penuh dengan data empirik dan massa fakta-fakta mental yang tidak saling berhubungan satu sama lain, yang harus didokumentasikan dalam otak sebagai sebuah kolom dalam sebuah kamus yang manampung pemiliknya untuk memberikan respon terhadap bebrbagai rangsangan dari dunia luar.

Menurut Gramsci, konsep kebudayaan serupa itu sungguh-sungguh berbahaya, khususnya bagi proletariat. Ia hanya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan Masyarakat yang tidak dapat mrnyesuaikan diri. Masyarakat yang percaya bahwa mereka superior di hadapan manusia lainnya karena sudah mengingat data-data dan fakta-fakta dan yang dengan cepat menyebutkannya dalam setiap kesempatan yang dengan demikian mengubah mereka menjadi suatu perintah antara diri mereka sendiri dengan orang lain. Ia berfungsi menciptakan sejenis intelektualisme yang lemah dan tanpa warna. Konsep serupa itu, menurut Gramsci, tidak tepat dianggap sebagai kebudayaan, (Faruk, 2015: 138).

Dimensi ekstra hegemoni inilah yang memungkinkan Gramsci merumuskan Kembali pertanyaan menyeluruh mengenai hubungan antara kelas dengan kebudayaan. Lewat konsep hegemoni itu dalam berbagai konteksnya Gramsci membuat tiga tantangan berbeda. Tantangan pertama adalah tantangan terhadap tradisi idealis liberalis yang memahami persoalan-persoalan budaya sebagai yang sifatnya apolitik atau persoalan roh yang bersangkutan paut dengan politik (Faruk, 2015:133).

Tantangan kedua tertuju kepada rekan-rekan marxisnya yang memberikan prosedur tersebut dan mereduksi kebudayaan semata-mata sebagai refleksi dari dasar ekonomi Masyarakat. Tantangan Ketika adalah terhadap zamannya sendiri untuk mentransformasikan hegemoni negara menjadi suatu “kepemimpinan moral dan intelektual” yang baru, yang akan meluas dan demokrasi (Faruk, 2015:134).

Bagi Gramsci, ada suatu pertalian yang penting antara kebudayaan dan politik, tetapi pertalian tersebut jauh dari pertalian yang sederhana dan mekanik. Kebudayaan harus dipecah-pecah menjadi berbagai macam bentuk, entah kebudayaan “tinggi” atau “rendah”, kebudayaan elite atau populer, filsafat atau *common sense*, dan dianalisis dengan batas-batas efektivitasnya dalam “penyamanan” bentuk-bentuk kepemimpinan yang kompleks.

### **b. ideologi**

Istilah ideologi seringkali hanya diartikan sebagai sistem ide, misalnya Ketika orang berbicara tentang ideologi liberal, konservatif, sosialis. Bagi Gramsci, ideologi lebih dari sekedar sistem ide. Ia membedakan sistem yang berubah-ubah yang dikemukakan oleh intelektual dan filosof tertentu, dan ideologi organik yang bersifat historis, yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu: sejauh ideologi itu secara historis diperlakukan, ia memiliki keabsahan yang bersifat psikologis: ideologis ‘mengatur’ manusia, dan memberi tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka, dan sebagainya.

Ideologi bukanlah fantasi perorangan, namun terjelma dalam cara hidup kolektif Masyarakat. (simon, 2004: 83-84).

Gramsci menganggap dunia gagasan, kebudayaan, superstruktur, bahwa hanya sebagai refleksi atau ekspresi dari struktur kelas ekonomi atau infrastruktur yang bersifat material, melainkan sebagai salah satu kekuatan material itu sendiri. Sebagai kekuatan material, dunia gagasan atau ideologi berfungsi mengorganisasi massa manusia, menciptakan suatu tanah lapang yang di atasnya manusia bergerak. Bagi Gramsci, hubungan antara yang ideal dengan yang material tidak berlangsung searah, melainkan bersifat saling tergantung dan interaktif. Kekuatan material merupakan isi, sedangkan ideologi-ideologi akan menjadi khayalan individu belaka tanpa kekuatan material, (Faruk, 2015: 131).

Gagasan ideologi yang dikemukakan Gramsci sangat relevan dengan konsepnya tentang kekuatan manusia pada wilayah individualnya. Melalui ideologi itulah individu dapat melakukan aksi-aksinya dalam berbagai bentuk sebagai manifestasi dari perjuangan merebut penguasaan, sebagai titik tumpu historis yang bersifat psikologis. Pada konteks inilah Gramsci membangun dasar teoritisnya tentang hegemoni (Anwar, 2010: 80)

Gramsci memakai istilah pemikiran awam (*common sense*) untuk menunjukkan cara orang awam yang tidak kritis dan sadar memahami dunia. Pemikiran awam tidak harus dilihat dalam pengertian yang negatif semata-mata; ia juga mempunyai unsur-unsur positif, dan aktifitas praktis mereka, perlawanan mereka terhadap penindasan,

mungkin sering berlawanan dengan gagasan sadar mereka. Pemikiran awam merupakan tempat dibangunnya ideologi, juga menjadi tempat perlawanan terhadap ideologi itu (simon,2004:27).

Melalui *common sense*-lah para pekerja, yang mencoba hidup dibawah kapitalisme, mengorganisir pengalaman mereka. *common sense* adalah tempat Dimana ideologi yang dominan dibangun, tetapi juga menjadi tempat perlawanan dan tantangan bagi ideologi tersebut. Gramsci menekankan bahwa konsensus yang diperoleh melalui hegemoni kaum borjuis adalah konsensus aktif, bukan ketundukan pasif. Konsensus itu tidak dipaksakan; namun diperoleh melalui perpaduan berbagai kekuatan dalam sebuah proses kompleks di mana subordinasi dan resistensi para pekerja itu terbentuk dan muncul kembali (Simon, 2004: 92-93).

### **c. Kaum Intelektual**

Gramsci memperluas defenisi kaum intelektual, yaitu semua orang yang mempunyai fungsi sebagai organisator dalam lapisan Masyarakat, dalam wilayah produksi sebagaimana dalam wilayah politik kebudayaan. Ia melakukan dobrakan ganda (*double break*) pandangan umum terhadap intelektual; mereka bukan hanya pemikir, penulis dan seniman namun juga organisator sebagai pegawai negeri dan pemimpin politik, dan mereka tidak hanya berguna dalam Masyarakat sipil dan negara, namun juga dalam alat-alat produksi sebagai ahli mesin, menajer dan teknis (simon, 2004:141).

Kata “intelektual” di sini harus dipahami tidak dalam pengertian yang biasa, melainkan suatu strata sosial yang menyeluruh yang menjalankan suatu fungsi organisasi dalam pengertian yang luas entah dalam lapangan produksi, kebudayaan ataupun dalam administrasi politik. Mereka meliputi kelompok-kelompok, misalnya dari pegawai junior dalam ketentaraan sampai dengan pegawai yang lebih tinggi, (Faruk, 2015: 150).

Kelompok intelektual pertama di atas disebut Gramsci sebagai kelompok intelektual “organik”, sedangkan kelompok kedua disebut kelompok intelektual “tradisional”. Kedua kelompok itu terpisah, tetapi secara historis dapat saling bertumpang tindih. Apa yang penting dalam hal ini adalah bahwa sifat hubungan antar kelompok itu sangat mempengaruhi sifat hegemoni yang ada: apakah ada konflik dan stabilitas antara mereka, atautkah ada pertalian politis dan akultural antara keduanya, (Faruk, 2015:151).

Tipe intelektual organik ini, mengakui hubungan mereka dengan kelompok sosial tertentu memberikan homogenitas serta kesadaran tentang fungsinya, bukan hanya dibidang ekonomi tetapi juga dibidang sosial politik. Intelektual organik adalah intelektual yang berasal dari kelas tertentu bisa jadi berasal dari kelas borjuis dan memihak mereka, bisa juga dari kelas buruh itu. Kelompok ini berpenetrasi sampai ke massa. Memberikan mereka pandangan dunia baru dan menciptakan kesatuan antara bagian bawah dan atas. Hal ini tidak berarti bahwa kebudayaan baru muncul saja dari

produksi melainkan harus menentang *common sense* dari cara-cara berfikir yang tradisional, (Patria & Andi Arief, 2003: 161-162).

Dalam cacatannya tentang *Risorgimento* Gramsci memberikan contoh intelektual organik dari para pemimpin partai moderat. Mereka adalah “intelektual dan organisator politik, dan pada saat yang sama sama juga bos-bos Perusahaan, petani-petani kaya manajer Perusahaan, penguasa komersial dan industri, dan sebagainya”. Mereka menyadari identitas dari yang diwakili, dan merupakan barisan terdepan yang riil dan organik dari lapisan kelas ekonomi papan atas yang disitu mereka termasuk di dalamnya. (Simon, 2004:144).

Sedangkan kategori kedua yang dibahas oleh Gramsci adalah intelektual tradisional. Jenis intelektual tradisional ini, merupakan intelektual yang dapat dikategorikan sebagai intelektual otonom dan mereka dari kelompok sosial dominan. Kelompok ini (humanis) memisahkan intelegensia dari tanah borjuis. Intelektual tradisional adalah mereka yang menyanggah tugas-tugas kepemimpinan intelektual dalam satu *given society*, (Patria & Andi Arief, 2003: 162-163).

#### **d. Negara**

Gramsci membedakan dua wilayah dalam Negara: dunia masyarakat sipil dan masyarakat politik. Yang pertama penting bagi konsep hegemoni karena merupakan wilayah “kesetujuan”, “kehendak bebas”, sedangkan wilayah yang kedua merupakan dunia kekerasan, pemaksaan, dan intervensi. Meskipun demikian, kedua dunia tersebut

termasuk dalam konsep Negara dalam pengertian khusus. Negara bagi Gramsci tidak hanya menyangkut aparat-aparat pemerintah, melainkan juga aparat-aparat hegemoni atau masyarakat sipil (Faruk, 2015: 153).

Gramsci memilah pengertian suprastruktur menjadi dua level struktur utama, yaitu masyarakat sipil dan yang kedua masyarakat politik atau negara. Dalam konsepsi Gramsci, “masyarakat sipil” mencakup seluruh aparatus transmisi yang lazim disebut “swasta” seperti universitas, sekolah, media massa, gereja dan lain sebagainya. Sebaliknya, “masyarakat politik” adalah semua institusi public yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan perintah secara yuridis seperti tentara, polisi, pengadilan, birokrasi dan pemerintahan.

Kedua level superstruktur ini merepresentasikan dua ranah yang berbeda, adalah ranah persetujuan dalam masyarakat sipil dan ranah kekuatan dalam masyarakat politik (Sugiono, 2006: 35).